

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Kontak dan pertukaran antar negara, khususnya dalam hal politik, adalah asal mula hubungan internasional. Namun, masalah internasional telah muncul seiring dengan perubahan zaman. Selain masalah politik, aktor non-negara atau nasional mulai menunjukkan minat terhadap isu-isu ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya yang cakupannya global. Kata “hubungan internasional” erat kaitannya dengan segala bentuk komunikasi antara warga negara masing-masing bangsa, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat umum. Studi tentang institusi perdagangan internasional, perjalanan, transportasi, komunikasi, dan promosi cita-cita dan etika universal hanyalah beberapa dari sekian topik yang termasuk dalam lingkup hubungan internasional. Selain itu, ini mencakup studi tentang urusan internasional, politik internasional, dan semua aspek interaksi antara negara-negara berdaulat. (Bainus & Rachman, 2018).

Menurunnya, pengaruh negara dalam politik global dan meningkatnya pengaruh non-negara dapat digunakan untuk memahami hubungan internasional. Perbedaan bangsa-ke-bangsa menjadi kurang jelas, dan tidak relevan. Bahkan batas-batas wilayah diabaikan oleh beberapa aktor non-negara (Perwita & Yadi, 2005).

Menurut Perwita & Yadi (2005:3-4) dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Hubungan Internasional adalah suatu bidang studi yang berfokus pada interaksi antara aktor atau anggota suatu masyarakat dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang sama. Munculnya hubungan internasional dituntut oleh fenomena saling ketergantungan dan semakin kompleksnya eksistensi manusia dalam komunitas global. Saling ketergantungan ini membuat isolasi suatu negara dari pengaruh lain menjadi tidak praktis”.

Hubungan internasional terkait erat dengan bagian-bagian ilmu sosial lain yang membangunnya dengan sifat ilmiah timbal balik, maka sejarah pertumbuhannya bersifat multidisiplin. Untuk menghindari konflik dan mempromosikan perdamaian lahir dari sejarah bagaimana hubungan internasional berkembang secara umum. Ada upaya signifikan untuk mempromosikan sains yang sepenuhnya otonom (Darmayadi, 2015:12).

Bidang teori hubungan internasional menggabungkan beragam perspektif dan sebagian besar berkonsentrasi pada negara sebagai unit studi utamanya. Negara sendiri sebagai aktor yang akan berinteraksi dengan dunia luar sebagai satu suara dan kesatuan. (Primawanti dkk., 2019:13).

Hubungan internasional terutama berkaitan dengan analisis perilaku aktor negara dan non-negara dalam konteks interaksi transnasional global. Negara, LSM, PBB, LSM yang fokus pada isu-isu subnasional, entitas subnasional termasuk birokrasi dan pemerintah, serta individu semuanya berperan dalam situasi ini. Menurut Mas'oeed (1994:28), perilaku ini dapat berupa kolaborasi, pembentukan aliansi, permusuhan, dan interaksi internal di dalam organisasi internasional.

Disiplin hubungan internasional lebih kompleks daripada interaksi intranasional karena melibatkan interaksi antara beberapa negara berdaulat, yang masing-masing mempunyai hak otonominya sendiri. Tujuan utama hubungan internasional adalah menganalisis perilaku aktor negara dan non-negara di arena internasional, sehingga berkonsentrasi pada studi tentang perilaku internasional. Perilaku tersebut dapat terwujud dalam bentuk perang, konflik, kolaborasi, pembentukan koalisi, kontak intra dan internasional, dan sebagainya. Memang benar, disiplin hubungan internasional sering dikonseptualisasikan sebagai studi tentang interaksi antara berbagai aktor di luar batas geografis. Sebuah negara yang mengisolasi diri dari dunia luar tidak dapat mencapai kerjasama karena saling ketergantungan satu sama lain dan semakin rumitnya kehidupan manusia dalam komunitas internasional (Perwita & Yadi, 2005:3-4).

Ada dua faktor utama yang berkontribusi pada pengembangan disiplin hubungan internasional: pertama, minat yang besar terhadap fenomena yang muncul setelah Perang Dunia I dan II, fakta bahwa konflik tersebut mengakibatkan sejumlah besar konflik, korban manusia dan kerusakan material yang luas, memperjelas betapa pentingnya mencegah konflik di masa depan (Soeprapto, 1997:12).

Belajar dari masa lalu, sekarang, atau masa depan. Hubungan internasional adalah interaksi dinamis antara entitas pemerintah dan non-pemerintah yang melampaui batas negara. Interaksi ini mencakup beragam fenomena sosial, termasuk unsur politik, ideologi, ekonomi, hukum, aspek

sosial dan budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. (Perwita & Yadi, 2005:8).

Selama bertahun-tahun, ada sejumlah isu yang muncul dalam praktik hubungan internasional, yang mencakup bidang-bidang berikut:

1. Hubungan antar Negara. Politik internasional selalu dimungkinkan oleh struktur negara-bangsa dan hubungan antar pemerintah.
2. Aktor yang bukan negara. Hubungan internasional di era modern sangat dipengaruhi oleh entitas non-negara seperti Kerjasama Multinasional (MNC), Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO), dan 20 Organisasi Antar Pemerintah (IGO).
3. Ekonomi Politik Global (IPE). Minat yang meningkat terhadap IPE telah muncul sejak dimulainya globalisasi pada pertengahan tahun 1980-an.
4. Keamanan Seluruh Dunia. Keamanan selalu menjadi prioritas utama bagi negara. Kekhawatiran terkait keamanan di masa lalu telah membawa perang dan perdamaian, oleh karena itu gagasan ini akan terus dipropagandakan.
5. Kita tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam permasalahan global saat ini, pemeriksaan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara akan sangat bermanfaat, khususnya bagi entitas yang berdaulat. seperti Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan lainnya yang muncul sebagai pemain kunci.

6. Globalisasi. Sejak awal 1980-an, kata "globalisasi" berarti transisi dari ekonomi dagang ke ekonomi liberal, dan menjadi penting dalam politik internasional lingkungan dalam skala global.
7. Kepedulian terhadap keamanan lingkungan telah meningkat secara global sebagai akibat dari industrialisasi dan kemajuan teknologi.
8. Terorisme di seluruh dunia. Terorisme internasional adalah kegiatan kriminal utama yang melibatkan penjahat dari banyak negara dan berdampak pada banyak negara. Topik ini terkait erat dengan perdamaian dan keamanan.
9. Akan lebih menantang untuk mempelajari isu-isu di bidang politik, keamanan, ekonomi, atau internasional dari sudut pandang yang lebih luas. Oleh karena itu, studi area semakin populer seiring berkembangnya organisasi regional dan kawasan perdagangan (Area Perdagangan Bebas).

Pada suatu waktu, para sarjana hubungan internasional hanya melihat dinamika antar negara yang berdaulat. Namun, studi hubungan luar negeri mulai mendapat lebih banyak perhatian di tahun-tahun berikutnya. Studi hubungan internasional memperoleh momentum baru selama Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, dengan masuknya aktor IGO dan INGO, pertumbuhan studi hubungan menjadi lebih rumit pada 1960-an dan 1970-an (*Inter Non Governmental Organizations*). Kajian pola hubungan internasional tahun 1980-an berfokus pada bagaimana negara berdaulat terlibat satu sama lain serta pemain non-negara yang tindakannya berdampak pada keberadaan negara-bangsa (Perwita & Yadi, 2005:3).

Sistem bipolar dihapuskan dengan berakhirnya Perang Dingin, dan Dunia sejak itu beralih ke multipolar, atau lebih tepatnya, beralih dari persaingan militer ke persaingan atau konflik ekonomi. Setelah berakhirnya Perang Dingin, ruang lingkup permasalahan hubungan internasional mengalami transformasi yang signifikan. Sebelumnya, konsentrasi utama adalah pada politik tingkat tinggi, termasuk isu politik dan keamanan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, hubungan internasional meluas hingga mencakup isu-isu yang lebih luas, termasuk terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Dunia berada dalam keadaan transisi setelah berakhirnya Perang Dingin. Hal tersebut berdampak pada bidang penelitian urusan internasional yang berkembang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya mencakup politik antar pemerintah, tetapi juga terorisme, masalah ekonomi, masalah lingkungan hidup, dan topik relevan lainnya. Selain itu, koneksi internasional menjadi lebih rumit. Aktor lain, atau aktor non-negara, terlibat dalam interaksi seperti halnya negara, dan posisi mereka dalam hubungan luar negeri sangatlah penting (Perwita & Yadi, 2005:7-8).

Banyak konflik pecah antar negara hingga akhir 1980-an sebagai akibat dari perbedaan tujuan mereka. Perselisihan juga bisa muncul ketika sekumpulan individu terikat oleh identitas tertentu, selain perselisihan antar bangsa (seperti etnis, suku, budaya, bahasa, sosial ekonomi, agama, politik dan lain-lain). Ada pula konflik dengan organisasi manusia lainnya ketika mereka memiliki tujuan yang berbeda.

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Salah satu komponen kunci dalam menciptakan peristiwa global adalah kebijakan luar negeri. Ini karena strategi suatu negara dapat menghasilkan pertukaran. Beberapa kebijakan dapat segera diterapkan dengan hanya bergantung pada intuisi, sedangkan kebijakan lainnya dapat dihitung secara parsial (Mintz & DeRouen, 2010:3). Penilaian terhadap suatu kebijakan menunjukkan bahwa keprihatinan internal tidak diragukan lagi dapat memengaruhi bagaimana suatu kebijakan ditetapkan. Cita-cita yang melekat pada setting domestik dapat mempengaruhi bagaimana politik internal terpolakan dan bagaimana tindakan dibentuk terhadap dunia luar.

Politik luar negeri adalah usaha yang dilakukan suatu bangsa melalui segala sikap dan tindakannya untuk menundukkan dan mengeksploitasi lingkungan luarnya. Kepala negara atau pemerintahan dapat mengambil keputusan berdasarkan pandangan, sifat individu, dan terutama ingatan (Rosenau, Thompson & Boyd, 1976). Faktor-faktor ini dapat membantu menentukan nada kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan negara dan nasional terkait erat dalam hal kebijakan luar negeri, membuat eksposur ke tujuan tersebut penting untuk sukses pada skala yang lebih penting dan terukur (Triwahyuni & Wulandari, 2016).

Kebijakan luar negeri, juga dikenal sebagai pendekatan strategis, mencakup konsolidasi kepentingan suatu negara, yang bergantung pada dinamika kekuatan dan kemampuan negara yang bersangkutan. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri mungkin lebih penting

dibandingkan bidang kebijakan lainnya, mengingat kebijakan tersebut mencakup kepentingan nasional, yang merupakan tujuan utama negara berdaulat. Kelangsungan hidup suatu negara dipertahankan dan dilindungi oleh strategi luar negerinya (Rosenau, Thompson & Boyd, 1976:32).

Holsti (1988) telah mengajukan sejumlah gagasan, termasuk kebijakan luar negeri. Menurut teori, kebijakan luar negeri adalah kombinasi dari ide-ide internal dan eksternal yang mencoba memecahkan suatu masalah atau membawa perubahan di wilayah tertentu. Kebijakan luar negeri setiap negara harus menyamakan dan memiliki pengetahuan dan kerja sama yang menyeluruh jika ada perbedaan tujuan atau kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan individu dan kepentingan kelompok. Setiap negara mengambil langkah seperti ini untuk memperoleh keunggulan dengan mempengaruhi negara lain, membangun reputasi, dan menjaga keamanan secara keseluruhan. Pada prinsipnya tiga gagasan dalam kebijakan luar negeri menjadi alasan keberadaan suatu negara untuk membuat atau melaksanakan kebijakan luar negeri, antara lain;

1. Salah satu pendorong utama di balik pengembangan kebijakan luar negeri adalah nilai yang ditempatkan suatu negara pada tujuannya. Hal ini agar politik luar negeri dapat diciptakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.
2. Komponen waktu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pencapaian tujuan dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri.

3. Target ekspektasi yang wajib dipenuhi oleh negara-negara anggota dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian. (Holsti, 1988).
4. Negara memiliki landasan, seperangkat praduga, serta tujuan tertentu dengan memperhatikan keamanan berskala nasional dalam kapasitasnya untuk merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri mencakup berbagai pertimbangan, termasuk perspektif dan tindakan negara lain, serta keputusan dan tindakan yang harus diambil sebagai respons terhadap faktor-faktor tersebut. (Holsti, 1988).

Rosenau (1980) menjelaskan bahwa:

“Kebijakan luar negeri mencakup berbagai factor, seperti keputusan yang dibuat oleh individu atau komite, hasil dari proses pembuatan kebijakan, perspektif kelompok kepentingan yang beragam, nilai-nilai yang dianut oleh elit yang berpengaruh, perwujudan aspirasi masyarakat, dan tantangan. Ranah global. Hubungan antara tujuan suatu negara dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya merupakan aspek mendasar dari konteks suatu negara. Komponen kebijakan luar negeri di setiap negara, berapapun ukurannya, adalah sama.”.

Selain itu, Rosenau (1980) juga berpendapat bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi bagaimana keputusan kebijakan luar negeri, yaitu faktor kelompok atau jabatan, faktor individu (*idiosyncratic*), faktor nasional, faktor birokrasi, dan faktor sistematis. Pertama, faktor individu atau ideosinkretik terkait dengan pandangan, identitas, dan sifat pribadi pembuat keputusan. Ini menyiratkan bahwa ketika suatu kebijakan sedang dikembangkan, dampak ideosinkretis pemain individu tidak akan terbagi. Ideologi, keyakinan, masyarakat, tujuan, dan faktor-faktor lain semuanya berada dibawah

pengaruh ideosinkretis ini. Secara umum, negara otokratis atau komunis dengan demokrasi terbatas adalah negara yang kebijakannya ditentukan oleh pilihan individu.

Kedua, spesifikasi kerja atau standar perilaku yang diharapkan masyarakat umum dari kelompok tertentu dapat disebut sebagai variabel kelompok atau jabatan. Dan percaya bahwa pilihan akhir adalah strategi yang tidak semata-mata didasarkan pada preferensi dan kepentingan pribadi, melainkan manifestasi dari kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud bisa berupa kelompok kepentingan, kelompok lobi, atau organisasi lain yang berusaha mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dengan mengambil sikap strategis dan kepentingan tertentu. Faktor ketiga, birokrasi, berkaitan dengan fungsi dan prosedur pemerintah dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri. Saat memperkenalkan variabel ini, Allison (2018) menyatakan bahwa dia memandang politik sebagai turunan dari rencana yang dibuat secara rasional yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan signifikansi akhir dari unit abstrak dan monolit yang kita sebut sebagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut tidak dipandang sebagai hasil musyawarah pribadi melainkan sebagai hasil dari berbagai perubahan dan kesepakatan. Oleh karena itu, negosiasi, kompromi, dan penyesuaian antara lembaga pemerintah, divisi bersenjata, dan divisi lainnya adalah bagian dari proses politik yang dikenal dengan politik luar negeri.

Keempat, faktor nasional, seperti perbedaan karakteristik nasional yang mempengaruhi hasil kebijakan luar negeri, seperti kekuatan, identitas nasional, filosofi, dan tujuan nasional. Komponen-komponen tersebut akan berinteraksi untuk membentuk suatu sistem bagi bangsa yang akan berbentuk sistem ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Struktur nasional setiap negara sepenuhnya menggabungkan sistem ini.

Setiap bangsa memiliki persyaratan dan kepentingan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan dan stabilitas, serta kepentingan elit penguasa. Setiap negara bebas untuk memilih arah kebijakannya sendiri sesuai dengan tujuan dan sasarannya sendiri, tetapi setiap negara juga harus menyadari dan menghargai kepentingan negara lain untuk mencegah intervensi yang dapat mengancam keamanan atau stabilitas. Ada tiga metode untuk melakukan kebijakan luar negeri: melalui perang, melalui kerja sama komersial, dan melalui perdamaian (Pratama, 2019).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kebutuhan suatu negara menimbulkan kepentingan nasional. Keadaan internalnya, termasuk politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya, dapat digunakan untuk memahami minat ini. Kepentingan juga didasarkan pada keinginan untuk mendirikan 'kekuasaan' agar Negara dapat secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusan nasional dalam upaya memperoleh penghormatan internasional.

Setiap bangsa mempunyai tujuan dan kepentingan berbeda yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi setiap negara untuk terlibat

dalam upaya kerjasama dengan negara lain. Untuk memahami perilaku internasional, penting untuk memahami gagasan tentang kepentingan nasional. Menurut para ahli, pemenuhan kepentingan nasional, yang mencakup orientasi kebijakan suatu negara terhadap negara lain, akan mendorong perilaku negara. (Oktaviani, 2021).

Thomas Hobbes (1986) sampai pada kesimpulan bahwa Negara dipandang sebagai penjaga wilayah, populasi, dan cara hidup yang unik dan tak ternilai harganya. Konsekuensinya, mengingat peran negara dalam kehidupan sehari-hari warga negara dan negara. Kehidupan masyarakat akan sangat dibatasi tanpa negara menyediakan keamanan untuk sumber daya dan keadaan atau mendorong kesejahteraan. sehingga suatu negara memperoleh kontrol atas ruang yang dimilikinya.

Gagasan tentang suatu bangsa yang memiliki hubungan konstruktif dengan bangsa lain dikenal sebagai kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional mendikte tindakan politik suatu negara, itu adalah prinsip utama dari kebijakan luar negeri yang realistis dan politik internasional. Kepentingan nasional, yang dipandang sebagai kepentingan Negara sebagai satu kesatuan, diprioritaskan jika mengambil sikap realis atau neorealis. Tujuan dasarnya adalah memperkuat kekuatan nasional untuk melindungi keamanan nasional dan menjamin eksistensi negara. *Idea of interest nasionalisme* berfungsi sebagai landasan untuk menafsirkan tindakan kebijakan luar negeri suatu negara (Ang, *et al*, 2015).

Kaum realis membandingkan pengejaran kekuasaan oleh negara, dimana kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membangun dan mempertahankan dominasi atas satu negara versus negara lain, dengan mengejar kepentingan nasional. Definisi istilah "kepentingan nasional" berikut ini dikemukakan oleh Holsti (1970):

“Menjaga keutuhan wilayah suatu negara, mencapai kemerdekaan, dan menjamin kelangsungan hidup suatu negara merupakan contoh kepentingan nasional. Namun, setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda-beda, oleh karena itu gagasan tentang kelangsungan hidup nasional dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Menurut Holsti (1970), ada tiga jenis kepentingan nasional yang utama. Istilah “nilai-nilai inti” pertama-tama mengacu pada cita-cita negara yang paling mendasar, yang menjadi inti dari sebuah bangsa. Kedua, terdapat tujuan-tujuan yang cakupannya lebih menengah, seperti meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara.”

Kepentingan nasional sering dikutip sebagai tujuan utama suatu Negara dalam menjalin aliansi dengan negara lain. Hubungan dengan negara lain mau tidak mau melibatkan berbagai titik masuk, yang dalam banyak hal menjadi tujuan dari hubungan atau kerja sama yang terjalin. Kepentingan nasional dengan demikian berkembang dari hubungan ini sebagai fokus utama dari kemitraan kooperatif, baik secara bilateral maupun multilateral dalam garis besar, tetapi tujuan khusus ini adalah Kepentingan Nasional sebagai intinya. Wolfers (2011), berbicara untuk negara terdiri dari integritas teritorial, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Namun, berbagai negara yang menghadapi beragam tantangan memiliki interpretasi mereka sendiri tentang kelangsungan hidup nasional.

Seabury (dalam Holstri, 1970), sementara itu, mengklaim bahwa Bagi sebagian orang, kepentingan nasional merupakan tujuan yang harus didorong

oleh kepemimpinan yang kuat. Tujuan nasional dapat menyatu pada seperangkat nilai pura-pura yang coba diaktualisasikan oleh suatu negara dalam tindakan hubungan luar negeri. Gambaran di atas menunjukkan bagaimana perkembangan hubungan internasional dimaksudkan untuk membantu setiap negara mewujudkan ekspresi kepentingan nasionalnya. dalam bukunya *Strategic Studies on the Transformation of the International System*, T. May Rudi (2005) mengemukakan pengertian kepentingan nasional pasca Perang Dingin ialah “Kebutuhan bangsa yang diinginkan dipenuhi melalui tindakan yang direncanakan”. Nasrun (1993) berpendapat bahwa fenomena ini merupakan kepentingan nasional dan menjelaskannya secara rinci.

“Kebijakan luar negeri, kemampuan diplomasi, kesiapan militer, vitalitas ekonomi, kohesi sosial, ancaman keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional sangatlah kompleks dan terdapat beberapa elemen yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuannya”.

Kepentingan nasional adalah gagasan yang banyak digunakan dan sering digunakan dalam analisis hubungan internasional. Gagasan ini digunakan sebagai tolok ukur seberapa baik kebijakan luar negeri suatu negara bekerja, menurut Morgenthau (1990):

“Memahami prioritas sebenarnya suatu negara adalah proses yang alami dan dapat diamati. Dengan mengembangkan teori untuk menjelaskan fakta ini, para analisis dapat menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas berbagai kebijakan internasional.”

Menurut Morgenthau (1990), konsep kepentingan nasional dapat dilihat melalui prisma kekuasaan. Mengetahui fakta-fakta penting untuk memahami dan menganalisis politik internasional, yang ditekankan oleh

sudut pandang ini. Jemadu (2008:67) menulis dalam *Global Politics in Theory and Politics* bahwa kepentingan nasional dapat dimajukan melalui penggunaan kekuasaan. Bahwa negara memainkan peran sentral dalam unit politik yang berdaulat tersirat dalam gagasan kepentingan nasional. Selain itu, setiap negara atau aktor bertujuan untuk memajukan kepentingan nasionalnya melalui mekanisme interaksi. Akhirnya, gagasan tentang "kekuatan" menangkap daya tarik ini. Kekuasaan digunakan untuk mendefinisikan "kepentingan".

Suatu bangsa dapat memiliki kepentingan nasional yang penting bagi kelangsungan hidup bangsa tersebut. Negara tersebut harus tetap eksis sebagai negara merdeka. Negara wajib melindungi otoritas atau yurisdiksinya dari perambahan. Selain itu, Negara memiliki andil dalam menjaga keutuhan wilayah sebagai wadah bagi organisasi politik. Kelangsungan hidup bangsa dan cita-cita dasarnya menjadi identitas politik luar negerinya. Klaim yang ada sangat penting bagi bangsa. Mengejar kepentingan nasional suatu negara merupakan landasan upaya diplomasinya di luar negeri yang merupakan tujuan yang tidak akan pernah berubah agar suatu negara dapat mengambil tindakan. Oleh karena itu, aspirasi suatu Negara dapat dianggap sebagai kepentingan nasionalnya, dan dari aspirasi ini, keputusan kebijakan dapat dibuat terhadap lingkungan yang berinteraksi dengan Negara.

Dalam hubungan internasional, gagasan mengenai kepentingan nasional diterima secara luas. Ketika mengambil keputusan mengenai kebijakan luar negeri suatu negara, gagasan tentang kepentingan nasional

menjadi prinsip panduan utama. Pada hakekatnya, kepentingan nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan bangsa lain, baik dalam konteks hubungan bilateral, regional, maupun internasional (Amal, 2021).

Gagasan kepentingan nasional dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana setiap negara berperilaku dalam urusan internasional. Selain itu, idenya Salah satu pertimbangan utama yang membantu pembuat kebijakan suatu negara membuat dan menerapkan kebijakan luar negeri adalah kepentingan nasional.

Hal ini dimungkinkan karena setiap negara akan memiliki tantangan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya jika gagasan kepentingan nasional tidak ditetapkan terlebih dahulu sebagai hasil yang diinginkan (Amal, 2021). Ada derajat kepentingan nasional yang dapat digunakan untuk memandu penetapan prioritas internasional. Ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Morgenthau, yaitu kepentingan nasional primer dan sekunder.

Kepentingan nasional primer adalah kepentingan yang tidak dapat dikompromikan, dan ketika berada dalam bahaya, negara harus siap untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindunginya. Kepentingan utama suatu negara adalah kepentingan yang terkait erat dengan kedaulatan dan kondisi fisiknya, seperti ukuran dan bentuknya, pertahanan dan keamanannya, serta identitas politik dan budayanya. Kepentingan sekunder adalah kepentingan yang penting tetapi

tidak berdampak langsung pada negara atau kedaulatannya. Hal ini terutama berlaku jika bunga sangat penting (Amal, 2021).

Selain itu, gagasan kepentingan nasional berfungsi sebagai prinsip panduan dasar bagaimana kebijakan luar negeri dikembangkan dan diterapkan di suatu negara. Kesulitan yang dihadapi setiap negara dalam mendefinisikan kebijakan luar negerinya yang mengharuskan terbentuknya gagasan kepentingan nasional sebagai tujuan akhir mungkin menjadi akar dari kejadian ini. Dengan kata lain, perjuangan untuk memenuhi tuntutan masing-masing negara dan kebutuhan internal tercermin dalam kepentingan nasional (Amal, 2021).

Pemenuhan tuntutan yang disebutkan di sini dapat mencakup kebutuhan pertahanan dan keamanan, serta kebutuhan ekonomi, sosial budaya, ideologi, dan politik. Selain itu, ini membahas kebutuhan untuk mencapai integritas dan stabilitas nasional, yang keduanya dapat berdampak positif terhadap perkembangan stabilitas dan ketertiban dalam skala global. Pada hakekatnya, kepentingan nasional suatu negara bersifat sementara dan dapat berubah seiring berjalannya waktu, keadaan, dan perkembangan apapun dalam masyarakat internasional.

Peningkatan pencapaian tujuan nasional merupakan hasil dari kesiapan menghadapi perubahan di tingkat domestik, regional, dan global. Hal ini dilakukan dengan harapan, jika ada masalah yang muncul, setiap bangsa akan lebih siap untuk menghadapinya dan menghindari dampak negatif. Kepentingan nasional dijadikan pertimbangan utama bagi para

pengambil keputusan dari masing-masing negara dalam praktik kehidupan bernegara sebelum mereka merumuskan dan menciptakan sikap atau tindakan. Hal ini karena mereka harus mempertimbangkan semua aspek kepentingan nasional serta berbagai isu dari dunia luar (Navari, 2016).

Akibatnya, perumusannya lebih seperti seperangkat tujuan ideal. Dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara, prestasi masyarakat dijunjung tinggi. Setiap pilihan dalam kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kemajuan kepentingan nasional dan perlindungan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam budaya tertentu. Selain itu, kekuatan fundamental negara adalah mencegah orang luar mempengaruhi identitas fisik, politik, dan budaya seseorang. Namun, interpretasi yang berbeda mengklaim bahwa kepentingan nasional mencakup seluruh pengertian yang diberikan oleh tradisi politik (Fitzgerald, 2020).

Kepentingan nasional merupakan pernyataan tuntutan dalam negeri yang harus dipenuhi melalui pengembangan interaksi internasional bilateral dan multilateral, baik secara lokal maupun eksternal. Di sisi lain, gagasan ini juga berupaya mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia, yang merupakan kewajiban global semua bangsa. Ungkapan "kepentingan nasional" paling sering digunakan saat berbicara tentang kebijakan luar negeri. Ungkapan ini sering digunakan sebagai dasar untuk mengkarakterisasi perilaku negara dalam urusan internasional (Burchill, 2005).

Ide ini sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan luar negeri karena, jika direduksi menjadi komponen yang paling mendasar,

Ada dua kategori utama di mana seseorang dapat menempatkan kebijakan luar negeri suatu negara. Keberhasilan dalam mencapai tujuan nasional dan mencapai kemajuan menuju tujuan tersebut. Kepentingan nasional, seperti yang dipahami oleh para elit nasional, dapat diartikan sebagai tujuan strategis negara yang menyeluruh. Tindakan diplomasi, atau pelaksanaan kebijakan luar negeri yang telah ditentukan, merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan nasional tersebut. (Burchill, 2005).

Kedua elemen ini bekerja sama untuk memungkinkan kita menilai seberapa sukses kebijakan luar negeri suatu negara pada saat tertentu. Ketika kebijakan luar negeri suatu negara menggunakan taktik diplomasi yang berhasil menjaga tercapainya kepentingan warganya, maka dianggap berhasil. Diakui bahwa kepentingan nasional merupakan gagasan politik internasional. Sejarah dapat secara ideologis berorientasi pada seperangkat nilai yang berfungsi sebagai kompas untuk bertindak atau berorientasi ideologis dalam hal kepentingan nasional. Dalam arti yang berbeda, pertimbangan ideologi atau keseimbangan kepentingan dapat memandu pilihan dan tindakan dalam politik luar negeri (Amal, 2021).

Menjadi wajar dan penting bagi suatu bangsa untuk mempertahankan kepentingannya sambil bekerja untuk itu. Setiap bangsa dan negara harus mengembangkan kebijakan dan rencana yang dianggap dapat diterima untuk melindungi kepentingannya nasionalnya. Ia juga harus terus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari interaksi dengan dunia luar dan sekitarnya (Burchill, 2005).

Kepentingan nasional ini dikejar melalui penggunaan taktik dan strategi. Pendekatan atau instrumen yang dibahas adalah politik luar negeri. Karena merupakan komponen dari strategi nasional, kebijakan luar negeri menawarkan rekomendasi dan keuntungan bagaimana menghadapi negara lain.

Karena kepentingan nasional dihasilkan dari tujuan nasional, kebijakan luar negeri suatu negara harus selalu disesuaikan dengan tujuan tersebut dalam pelaksanaannya. Lebih khusus lagi, itu harus mempromosikan pencapaian tujuan tersebut. Pembangunan kepentingan nasional akan menghasilkan kebijakan yang menyangkut pertahanan rakyat, keutuhan wilayah, kedaulatan, dan lain-lain (Fitzgerald, 2020).

Menurut Morgenthau *dalam* Fitzgerald (2020), kata kepentingan nasional memiliki pengertian yang beragam. Tradisi politik, latar belakang budaya, dan kebijakan luar negeri masing-masing negara semuanya secara logis menentukan makna konsep dan isinya. Ini menjelaskan bagaimana kepentingan suatu negara bergantung pada tradisi politiknya, sekutu diplomatiknya, dan sejarah yang memunculkan struktur politik negara saat ini. Sebelum memutuskan untuk berkolaborasi, tradisi 24 dalam lingkungan budaya dapat dilihat dari perspektif nasional, lahir dari kemanusiaan nasional dan mengembangkan tradisi yang berlaku sebagai standar nasional.

Ide ini dijelaskan dengan istilah yang sama dengan bertahan hidup dalam bukunya Mohtar Mas'ood. Dalam situasi ini, kelangsungan hidup harus didasarkan pada adanya kemampuan minimal yang dapat dirasakan lintas

kepentingan negara, tetapi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) relatif terbatas (Amal, 2021).

2.1.4 Kepentingan Bidang Keamanan

Seperti yang kita ketahui bersama pada dasarnya keamanan dan pertahanan ialah suatu aspek yang amat krusial dalam memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi suatu negara dan para pengikutnya atau warga negaranya. Aspek ini sangat berfungsi baik guna melakukan pertahanan diri terhadap adanya kemungkinan ancaman-ancaman dari luar ataupun dalam negeri selaku upaya negara itu sendiri dalam mempertahankan kedaulatannya. Pertahanan dan kepentingan di bidang keamanan pun merupakan bentuk upaya negara guna menjaga keutuhan wilayah, mempertahankan kedaulatan serta menyelamatkan bangsa serta negaranya dari gangguan juga ancaman yang hadir kepada keutuhan bangsa itu sendiri.

Dengan pemahaman, dinamika kehidupan berbangsa dan interaksi setiap bangsa dengan bangsa lain harus menjamin keamanan dan kehormatan negara. Menurut perspektif ini, tujuan pembangunan pertahanan bukan hanya untuk mendukung prakarsa yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan angkatan darat, tetapi juga dan mungkin yang lebih penting untuk membantu meningkatkan diplomasi (Dewi, 2021).

Tantangan non fisik dari kepentingan antar negara juga menjadi ancaman bagi kehidupan negara selain ancaman fisik yang ditimbulkan oleh kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan menyangkut baik

faktor non fisik, seperti kepentingan keselamatan dan kehormatan bangsa, maupun faktor fisik, seperti penguasaan wilayah (Dewi, 2021).

Dalam sejumlah besar kamus, kata aman berfungsi sebagai dasar untuk keamanan. Pengertian “aman” dalam bahasa Indonesia adalah “damai”, Keselamatan menurut Aksan (2023) adalah tidak adanya rasa khawatir atau takut, persepsi bahwa seseorang aman dari kerusakan, dan tidak adanya bahaya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “keamanan” adalah ketenangan jiwa atau keadaan yang aman dan tenteram, sedangkan keamanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal (Aksan, 2023).

Sedangkan pertahanan negara suatu negara adalah kekuatan sipil dan militer yang dibentuk untuk menjamin keutuhan wilayahnya, memberikan perlindungan terhadap individu, dan/atau menjaga kepentingannya. Konsep pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter merupakan dua jenis tugas pertahanan negara.

Perang dan kegiatan militer selain perang termasuk dalam peran pertahanan militer. Sedangkan pertahanan sipil meliputi tugas penanggulangan bencana alam, ekonomi, sosial budaya, operasi kemanusiaan, pertahanan psikologi yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi, fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional, baik militer maupun non militer. kekuatan militer dan pertahanan sipil. Masalah seperti yang dikatakan oleh Wolfers (1952), membangun kekuatan untuk menangkal (mencegah) atau

menaklukkan (mengalahkan) serangan adalah masalah utama yang dihadapi setiap bangsa.

Dalam studi hubungan internasional, ide keamanan diperdebatkan. Bagi setiap individu, konsep keamanan berarti sesuatu yang berbeda. Karena meningkatnya ketergantungan dan kerumitan hubungan internasional selama periode globalisasi sehingga hal ini terjadi (Perwita & Yadi, 2005). Keamanan didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman untuk memperoleh nilai, serta tidak adanya ketakutan bahwa nilai tersebut akan diserang (Baylis & Smith, 2006:255). Aman atau tidaknya suatu negara bergantung pada kemampuannya mempertahankan diri dan menang jika terjadi konflik, serta kemampuannya mencegah penyerahan cita-cita esensial untuk menghindari perang. (Lippmann, 1943).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, telah terjadi pergeseran fokus pembahasan keamanan dari isu keamanan negara, pertahanan, dan keamanan militer menjadi isu yang lebih terkait dengan keamanan ekonomi dan sosial, termasuk masalah militer, kesiapan militer, dan kebijakan terkait dengan manusia dan hak minoritas, migrasi, kemiskinan, lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, saat membuat undang-undang keamanan, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal berikut: "keamanan untuk apa, perlindungan dari apa, keamanan dengan apa, dan keamanan dalam apa?". Akibatnya, masalah keamanan dapat dibagi menjadi dua kategori (Jackson-Preece, 2011):

1. Keamanan negara, yang mencakup:

a. Masalah Keamanan Nasional

Keamanan nasional mengacu pada kebijakan pemerintah yang menggunakan sarana ekonomi, militer, dan diplomatik untuk melindungi keselamatan dan keamanan negara baik dalam damai maupun dalam konflik. Gagasan itu dibuat dalam teori di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Suatu negara harus memiliki keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lainnya untuk mencapai keamanan nasional. Ancaman keamanan muncul dari berbagai sumber, termasuk beberapa yang secara tradisional tidak dianggap sebagai musuh, seperti negara lain, seperti pengedar narkoba, perusahaan multinasional, dan kelompok non-pemerintah yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Cara yang diambil guna memberikan suatu kepastian pada keamanan nasional yang sudah diputuskan ialah:

- 1) Pertama, harus menggunakan taktik diplomatis untuk meningkatkan hubungan sosial dan mengatasi segala kesulitan.
- 2) Mengandalkan kekuatan ekonomi untuk memacu atau memaksa kolaborasi mempertahankan militer yang kuat.
- 3) Bersiap untuk keadaan darurat dan melakukan pertahanan sipil, menjamin pemulihan cepat dan perluasan infrastruktur vital.
- 4) Mempertahankan budaya nasional yang tidak diakui atau anti-nasionalisme, terutama di bidang hiburan populer, membutuhkan kerja badan intelijen untuk mengidentifikasi, melawan, atau

mencegah ancaman dan spionase, serta untuk mengamankan informasi rahasia.

b. Masalah Keamanan Regional

Gagasan keamanan kawasan merupakan suatu cara kerjasama yang dilakukan sebagai salah satu arus yang mendekatkan hubungan bangsa-bangsa satu sama lain. Dalam arti geografis, regionalisme didefinisikan sebagai pengelompokan negara-negara dalam suatu wilayah. Keamanan regional dapat didefinisikan sebagai perasaan bersama tentang ancaman serius yang memerlukan kolaborasi lengkap berdasarkan tujuan bersama. Buzan juga menyoroti sulitnya keamanan regional, menekankan bagaimana suatu negara seringkali mengembangkan keamanan regional berdasarkan permusuhan dan kebencian, bukan persahabatan, kepercayaan, dan kolaborasi (Buzan & Hansen, 2009).

Keamanan regional memungkinkan pemeriksaan dan penjelasan formal tentang seluk-beluk yang ada di antara negara-negara di satu kawasan. Masalah keamanan regional terkait langsung dengan masalah keamanan negara. Sekalipun negara-negara di suatu kawasan saling bergantung satu sama lain, hal itu tidak menjamin kondisi damai dan sejahtera; sebaliknya, keamanan di area tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penyeimbangan kekuatan dan aliansi dengan negara lain (Buzan & Hansen, 2009).

Karena aktor pendukung di kawasan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pola hubungan kawasan, maka akan muncul perbedaan persepsi tentang mekanisme pengaturan keamanan dan dampak kekuatan dominan, sehingga memunculkan organisasi sebagai wadah persepsi tersebut.

c. Keamanan Internasional

Bidang studi sistematis yang menarik di bidang hubungan internasional adalah keamanan internasional. Agar kajian tetap fokus pada penggunaan kekuatan untuk meramalkan munculnya bahaya eksternal. Istilah keamanan internasional didefinisikan sebagai bagaimana negara mampu eksis dalam keadaan sistem internasional yang berkarakter anarkis. Penggunaan kekerasan dan upaya untuk mewujudkan perdamaian saling terkait, dengan upaya untuk membangun perdamaian secara eksplisit menekankan senjata kekerasan milik negara seperti ekspansi militer. Isu terorisme, perselisihan internal, dan perang saudara disoroti dalam tulisan ini.

Masalah keamanan menonjol dalam banyak konteks berbeda, namun masih terkait dengan masalah lain. Gagasan keamanan internasional mencakup semua aspek untuk mencapai keharmonisan interdisipliner (Wardoyo, 2015).

2. Keamanan Individu

Menurut Tarwoto, Wartonah & Lestari (2015), keamanan adalah kondisi keselamatan dan keamanan. Keselamatan dapat membantu orang

merasa aman dalam beraktivitas, Pengurangan stres dan peningkatan kesehatan dikaitkan dengan pengalaman kebebasan dan keamanan tanpa adanya bahaya yang dirasakan. Keamanan juga lebih dari sekadar mencegah rasa sakit atau bahaya.

Sementara keamanan itu sendiri adalah sistem dari segala sesuatu yang berarti dan melindungi kita. Frasa ini biasanya dikaitkan dengan semua jenis kecelakaan dan aktivitas kriminal. Keamanan itu sendiri sangat penting karena membantu mempertahankan stabilitas. Misalnya, keamanan nasional membantu menjaga ekonomi dengan menggagalkan kejahatan tingkat tinggi seperti terorisme dan kejahatan dunia maya.

Tujuan serta fungsi pertahanan serta keamanan suatu negara pun antara lain ialah:

- a. Menjaga juga melindungi kedaulatan suatu negara.
- b. Melindungi serta menjaga keutuhan suatu negara
- c. Melindungi serta menjaga segenap komponen bangsa dari berbagai macam ancaman yang mungkin hadir.
- d. Mempertahankan serta mewujudkan seluruh wilayah suatu negara sebagai suatu kesatuan keamanan.
- e. Mewujudkan adanya stabilitas pada keamanan dan pertahanan negara.

2.1.5 Konflik Internasional

Dunia disibukkan dengan topik konflik internasional. Perang internasional adalah topik diskusi yang populer karena, jika dibiarkan, dapat berdampak pada negara lain. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua negara berselisih. Namun pengaruh dan dampaknya meluas ke negara-negara lain juga. Tentu saja, efeknya berbeda-beda tergantung negaranya. Masalah kerjasama dan ekonomi adalah salah satu yang paling penting. Karena itu, setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi jika terjadi krisis internasional. Perang diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, dalam beberapa situasi, terutama dengan negara-negara kuat, mungkin sulit bagi negara-negara berkembang untuk bersatu.

Konflik internasional juga dapat dilihat sebagai kontak sosial antara orang atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda dan pengaruh yang kuat. Ketidaksepakatan didefinisikan sebagai ketidaksepakatan yang disebabkan oleh perbedaan dalam kepentingan, perilaku, nilai, dan sudut pandang (Holstri, 1992).

Harus ada pemicu untuk setiap isu atau perselisihan yang muncul. Konflik harus disertai atau dipengaruhi oleh sesuatu agar ada. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan konflik global ialah: (Holsto, 1992)

1. Faktor Keuangan

Masalah ekonomi adalah salah satu penyebab paling umum dari konflik internasional. Konfrontasi internasional antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu contoh dari sesuatu yang sekarang terjadi. Negara-

negara lain terkena dampak ekonomi dari dampak konflik antara kedua negara.

2. Zonasi Batas Wilayah

Masalah status klaim batas wilayah merupakan elemen lain yang berkontribusi terhadap konflik internasional. Konflik di sepanjang perbatasan internasional cenderung lebih sering terjadi di negara-negara tetangga.

3. Sumberdaya dari Alam

Tidak diragukan lagi, setiap negara mendapat manfaat dengan cara yang berbeda dari sumber daya alamnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sumber daya alam menyebabkan sengketa internasional.

4. Budaya

Salah satu penyebab utama konflik antar bangsa adalah budaya. Apalagi bangsa-bangsa yang memiliki banyak karakteristik. Salah satu ilustrasinya adalah kesamaan budaya Malaysia dan Indonesia yang masih ada sampai sekarang.

5. Aspek Hukum

Konflik internasional juga dapat dipicu oleh komponen hukum. Kami menyadari bahwa mengembangkan kerja sama internasional adalah sesuatu yang diminati oleh semua negara.

6. Komponen Moralitas Global

Konflik internasional seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti perselisihan moral antar negara. Ketika negara-negara bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi mereka, masing-masing pasti memiliki budaya dan moralitas yang unik.

Dasar sebenarnya dari konflik, bahkan hingga memicu konflik rasial, adalah perbedaan dalam prinsip-prinsip moral ini. Salah satunya adalah contoh kerjasama Singapura dan Malaysia.

Setidaknya satu dari enam unsur di atas yang berkontribusi terhadap konflik internasional menunjukkan bahwa isu tidak muncul begitu saja. Padahal pemicunya banyak. Pemaparan diatas hanya beberapa dari sekian banyak penyebab konflik internasional selain apa yang disebutkan di atas.

2.1.6 Konflik Wilayah

Konflik teritorial ialah ketidaksepakatan tentang siapa yang berhak menguasai sebidang tanah tertentu antara dua negara atau lebih, atau tentang siapa yang berhak melakukannya setelah suatu negara menguasai suatu wilayah dari kekuasaan sebelumnya yang tidak lagi diakui oleh negara saat ini.

Meskipun terkadang konflik dipicu oleh pertimbangan nasionalisme budaya, agama, dan etnis, hak kepemilikan atas sumber daya alam seperti sungai, tanah subur, mineral, atau minyak seringkali menjadi pusat perselisihan ini. Sengketa teritorial biasanya muncul dari terminologi yang ambigu atau kata-kata dalam perjanjian yang mendefinisikan perbatasan kedaulatan.

Karena merupakan sifat teritorial suatu negara, persoalan wilayah menjadi sangat penting di antara perselisihan internasional yang dapat dikuantifikasi. Sengketa wilayah (mengenai garis perbatasan) dan perebutan penguasaan seluruh wilayah termasuk perbatasan adalah dua jenis konflik wilayah yang dapat diidentifikasi. Negara harus memiliki yurisdiksi atas wilayah yang disengketakan karena perbedaan besar dalam bagaimana perbatasan kedua negara ditarik. Sengketa perbatasan sering menimbulkan masalah yang menantang dalam hubungan internasional karena pentingnya wilayah suatu negara hampir disamakan dengan loyalitas dan intoleransi. Negara tidak akan memperdagangkan wilayahnya untuk uang tunai atau keuntungan lainnya (Goldstein, 2008).

Ketika perdamaian akhirnya tercapai antara Israel dan Mesir pada tahun 1978, perselisihan yang berkepanjangan mengenai wilayah tepi pantai Taba, tempat para pengembang Israel membangun hotel di luar batas wilayah sebelumnya, akhirnya terselesaikan. Sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade karena hubungan antara wilayah dan keutuhan negara, yang membuatnya jauh lebih berharga daripada nilai ekonominya atau strategi yang mereka terapkan bersama. Kedua, negara akhirnya memutuskan untuk merujuk masalah tersebut ke undang-undang arbitrase, dan ketiga, wilayah tersebut dinyatakan sebagai milik Mesir. Bagi Mesir, mengklaim kembali setiap mil persegi wilayahnya adalah Selain menjadi kebanggaan nasional, permasalahan yang ada juga turut menunjukkan kemandirian negara dan terpeliharanya batasan fisiknya, sehingga menegaskan kembali penggabungan

tanah tersebut ke dalam negara Mesir. Perancis memiliki sentimen yang sama untuk Alsace-Lorraine (Goldstein, 2008).

Hal-hal yang berkaitan dengan koloni dan wilayah milik negara lainnya digunakan sebagai pengecualian terhadap sikap terhadap wilayah ini. Karena fakta bahwa itu bukan bagian dari wilayah pusat atau terhubung dengan konsep negara, itu hanya memiliki nilai sebagai properti yang dapat diperoleh melalui tawar-menawar dan konflik politik dan digunakan sebagai mata uang. Ini terjadi ketika Prancis dan Rusia menjual wilayahnya masing-masing di Louisiana dan Alaska ke Amerika Serikat. Wilayah-wilayah ini penting karena sumber daya alam yang dikandungnya atau karena lokasi geografisnya (Goldstein, 2008).

Terlepas dari penurunan nyata dalam nilai yang terkait dengan suatu wilayah dari waktu ke waktu karena kemajuan teknologi, Tidak ada penurunan nilai yang nyata untuk suatu wilayah yang terletak di dalam wilayah utama suatu negara. Karena terbentuknya sistem global dalam budaya agraris pada masa Sun Tzu, pepatah “tanah menjadi landasan negara” menjadi diterima secara umum sepanjang masa hidupnya. Secara historis, pemekaran wilayah mendominasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pertanian, dan penyediaan bahan pokok. Dalam jangka panjang, menang dan kalah perang berarti mendapatkan atau kehilangan wilayah, serta kekayaan dan kekuasaan. Namun, perdagangan dan teknologi menghasilkan kemakmuran yang lebih besar di abad ke-20 daripada pertanian. Sebagian

besar sengketa teritorial tampaknya lebih mahal dalam hal keuntungan ekonomi daripada wilayah yang sebenarnya (Goldstein, 2008).

Di masa lalu, perang sering mengakibatkan terciptanya perbatasan baru antar negara, dan alat militer terbukti menjadi alat yang berguna untuk mengendalikan wilayah. Wilayah dapat dikuasai oleh kekuatan militer dengan cara yang hanya dapat diatasi dengan kekuatan militer tambahan. Misalnya, diakui bahwa tidak ada tindakan lain (seperti sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, atau diskusi) selain menggunakan kekuatan militer yang sebenarnya ketika Saddam Hussein mendirikan perbatasan baru Irak dengan menginvasi wilayah Kuwait (Goldstein, 2008).

Sistem internasional memiliki norma yang kuat terhadap upaya untuk mengubah batas negara melalui kekerasan sejak Perang Dunia II. Komunitas internasional lebih fokus pada inisiatif lain, Selama invasi Irak ke Kuwait, yang mengakibatkan hancurnya perbatasan negara, sebagian besar penduduk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Gagasan bahwa batas-batas internasional tidak dapat diganggu gugat setelah perang dingin tampaknya diperkuat oleh perang melawan Irak. Di sisi lain, ketika suatu negara menganggap pelanggaran kecil untuk menggantikan pemerintah saingan dan memasang rezim boneka, hal ini dilakukan dengan kekerasan meskipun integritas teritorial negara tersebut tidak dirugikan walaupun pelanggaran kedaulatannya terang-terangan. Ide panduannya adalah bahwa meskipun administrasi berubah, perbatasan negara tidak akan berubah (Goldstein, 2008).

2.1.7 Konflik Etnis

Menurut Robbins *dalam* Sopiah (2014), Konflik merupakan fenomena dinamis yang dimulai ketika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan menimbulkan akibat negatif terhadap dirinya. Nimran, di sisi lain, mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana banyak pihak merasakan adanya kesenjangan antara tujuan masing-masing dan cara untuk menghambat pencapaian pihak lain.

Bahasa memungkinkan interpretasi konflik sebagai ketidaksepakatan, kontradiksi, dan argumen (Sagala & Zainal, 2011:274). Pada hakikatnya, konflik adalah suatu jenis hubungan atau interaksi antara orang-orang, baik secara terpisah maupun dalam kelompok, yang ditandai dengan pendekatan yang berlawanan (antagonistik) untuk mencapai suatu tujuan dan diakibatkan oleh perbedaan nilai, motivasi, emosi, dan psikologi.

Setiap orang adalah entitas yang berbeda. Ini menyiratkan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang dan emosi yang unik. Perbedaan sentimen dan posisi inilah yang menyebabkan perselisihan sosial. Tidak ada masyarakat yang pernah tanpa perselisihan internal atau eksternal antara konstituennya atau dengan organisasi lingkungan lainnya. Veithzal R menyatakan bahwa sengketa pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu (Sagala & Zainal, 2011:283):

1. Ketertarikan, khususnya sesuatu yang memacu tindakan atau kelambanan.

Inspirasi ini berasal dari tugas dan kedudukan seseorang serta keinginan pribadi mereka, menurut sebuah bagan.

2. Emosi (emosi), yang seringkali berbentuk emosi seperti amarah, benci, takut, dan penolakan dan hadir di hampir semua pertemuan manusia.
3. Nilai, khususnya unsur konflik yang paling sulit diselesaikan karena tidak dapat dirasakan atau diartikulasikan. Pada kenyataannya, nilai-nilai adalah apa yang memotivasi dan menegakkan perilaku manusia dengan membimbing dan memelihara pikiran dan emosi tentang benar dan salah, baik dan jahat.

Istilah "etnisitas", yang berasal dari kata Yunani "*ethnos*", menunjukkan individu atau negara. Kata "etnisitas" mengacu pada perasaan kepemilikan bersama yang didasarkan pada nenek moyang, bahasa, sejarah, budaya, ras, atau kepercayaan yang sama (atau campuran dari ini).

Beberapa berpendapat bahwa daftar tersebut harus mengecualikan kata-kata berdasarkan keyakinan dan mengizinkan istilah berdasarkan etnis. Pembagian ini hanyalah dalih dari sudut pandang identifikasi kesatuan politik dan kelompok (Chandra, 2006).

Tajfel (1981) berpendapat bahwa Etnisitas dapat dipandang sebagai perspektif subjektif yang dipengaruhi oleh kesadaran individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai budaya substansial dan ikatan afektif. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa etnisitas merupakan suatu konstruksi sosial. Orang yang percaya bahwa mereka berbagi kelompok etnis dengan orang lain dikatakan mematuhi kelompok etnis tersebut secara sosial. Banyak variabel, termasuk masyarakat, nilai, bahasa, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk

mengidentifikasi kesamaan. Perbedaan dalam komunitas ras tidak serta merta dikesampingkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya konflik etnis ialah suatu permasalahan atau gesekan yang terjadi di antara dua kubu konflik yang dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar dan signifikan bila tidak segera ditangani dan diselesaikan.

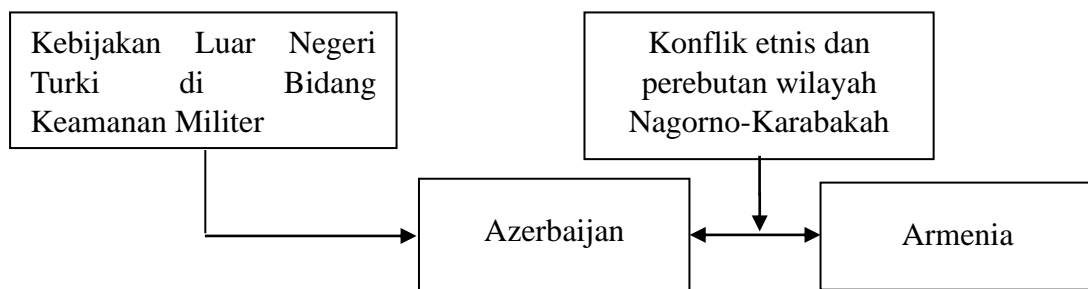
2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya penulis akan menggunakan tiga konsep utama yakni konsep diplomasi pertahanan, konsep kerjasama internasional serta konsep kepentingan nasional. Faktor global dan regional mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri dilakukan, dan dinamika domestik juga memainkan peran penting dalam penciptaan kebijakan luar negeri. Politik luar negeri dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk diplomasi pertahanan negara dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional menciptakan hubungan yang saling menguntungkan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kedua negara. Melalui diplomasi militer, kepentingan nasional menumbuhkan kepercayaan timbal balik untuk menghindari dan mengakhiri konflik.

Meskipun tidak ada satupun makna kebijakan pertahanan negara yang disepakati, banyak negara telah mengembangkannya sendiri. Diplomasi pertahanan negara melibatkan warga negara dari berbagai aspek tidak hanya tentara. Gagasan

kepentingan nasional menjadi dasar untuk masalah penelitian, dengan Turki dan Azerbaijan dimana keduanya bekerja sama untuk memajukan kepentingan nasional masing-masing.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran